

EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 – 2022

Iing Zenal Arifin*, Didin Muhafidi, Arifah Rosmajudi

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: * iinx@rocketmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pencapaian, dampak, dan efektivitas kebijakan pembangunan selama periode tersebut. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis data sekunder, survei lapangan, dan wawancara dengan pemangku kebijakan, serta analisis statistik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah kebijakan perencanaan pembangunan yang telah diimplementasikan selama periode 2017-2022 telah memberikan dampak yang positif pada perkembangan Kota Tasikmalaya. Peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kualitas hidup masyarakat merupakan beberapa hasil yang dapat diidentifikasi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu di atasi, seperti masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kota Tasikmalaya, masalah persampahan dan masalah kemiskinan. Dari hasil penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan, seperti keterbatasan anggaran dan koordinasi antar instansi sehingga disarankan agar pemerintah Kota Tasikmalaya terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Kata kunci: Evaluasi kebijakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama pembangunan daerah meningkatkan kesejahteraan penduduknya, hal tersebut ini dapat dicapai dengan meningkatkan pendapatan penduduk, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengurangan tingkat kemiskinan. Salah satu pembangunan yang umum dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur: Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan listrik, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk, sehingga yang menjadi tujuan utama dalam pembangunan daerah yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur tersebut.

Pembangunan dalam pengembangan ekonomi bertujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, mendiversifikasi sektor ekonomi, dan meningkatkan daya saing daerah dalam perekonomian nasional

maupun internasional. Sementara pembangunan dalam pendidikan bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang menjadi salah satu tujuan paling penting dalam pembangunan, hal tersebut membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan mampu bersaing di pasar kerja.

Pelaksanaan pembangunan juga bertujuan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam, termasuk pengelolaan tata ruang, pengurangan polusi, dan pelestarian alam. Pembangunan daerah juga harus mencakup pemberdayaan masyarakat, yang melibatkan partisipasi penduduk dalam proses pengambilan keputusan, penguatan kapasitas, dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan dalam peningkatan akses kesehatan oleh masyarakat merupakan upaya yang terus dilakukan pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pencegahan penyakit dan perawatan medis bagi masyarakat secara keseluruhan.

Setiap pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya evaluasi untuk membandingkan antara hasil dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dibuat selama 5 tahun dalam periode kepemimpinan Kepala Daerah, atau disebut dengan RPJMD. Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan merupakan proses penilaian sistematis untuk mengukur kinerja dan dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan dalam konteks perencanaan pembangunan suatu wilayah, negara, atau organisasi.

Beberapa tujuan dari adanya evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan diantaranya untuk mengukur efektivitas kebijakan. Salah satu tujuan utama evaluasi yaitu melakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam menentukan apakah kebijakan tersebut efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya evaluasi mencakup penilaian terhadap seberapa efisien kebijakan-kebijakan tersebut dalam menggunakan sumber daya, termasuk waktu, uang, dan tenaga kerja, dan apakah kebijakan telah memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal.

Pelaksanaan pembangunan dipastikan memiliki dampak positif dan negatif, sehingga selama evaluasi penting untuk mengidentifikasi dampak langsung atau dampak tidak langsung dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi juga melibatkan penilaian terhadap sejauh mana kebijakan tersebut adil dan tidak mendiskriminasi, apakah kebijakan dalam perencanaan pembangunan telah dibuat merata dalam memberikan manfaat kepada semua kelompok masyarakat ataukah hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.

Evaluasi kebijakan berperan dalam memastikan akuntabilitas pemerintah atau organisasi yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Ini bisa membantu mengidentifikasi jika ada kegagalan atau ketidakpatuhan dalam implementasi. Disamping itu evaluasi dalam perencanaan pembangunan dan hasilnya dapat

membantu mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan yang ada dan memberikan masukan untuk perbaikan, hal tersebut dapat melibatkan perubahan dalam perencanaan, desain, atau pelaksanaan kebijakan. Lasswell dan Kaplan (Islamy, 2004) menyatakan: “Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah”.

Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau entitas yang berwenang untuk mengatasi masalah atau isu-isu yang penting dalam masyarakat. Kebijakan publik seringkali dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dianggap baik untuk masyarakat secara keseluruhan atau untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit (Wahab, 2008, hal. 40). Tujuan dari kebijakan publik dapat bervariasi, termasuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, menjaga lingkungan, memastikan keadilan sosial, dan banyak lainnya.

Kebijakan publik dapat diimplementasikan melalui berbagai instrumen, seperti undang-undang, peraturan, program-program pemerintah, insentif, atau tindakan lain yang dapat memengaruhi perilaku dan kondisi masyarakat. Istilah kebijakan menurut Edward III dan Sharkansky (Joko, 2001) menyatakan: *“What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs”*. Pengambilan kebijakan publik biasanya melibatkan proses politik yang melibatkan pembuat keputusan, pemilihan umum, dan partisipasi masyarakat. Kebijakan publik dapat berubah seiring waktu sejalan dengan perubahan kebutuhan dan prioritas masyarakat serta perubahan politik dan ekonomi. Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan analisis masalah, pengumpulan data, konsultasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil evaluasi kebijakan RJPMD yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas pelaksanaan pembangunan belum berjalan sesuai dengan rencana dikarenakan terbatasnya anggaran, lingkungan dan sumberdaya manusia (Linayati, dkk. 2018). Hasil yang diharapkan dari pembangunan daerah dapat beragam tergantung pada tujuan dan prioritas masing-masing pemerintah daerah. Pada umumnya yang menjadi tujuan utama dari pembangunan daerah yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk setempat sambil mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Evaluasi kebijakan merupakan bagian penting dari serangkaian implementasi sebuah kebijakan. Penilaian atau evaluasi terhadap perencanaan pembangunan dan hasilnya membantu dalam menilai sejauh mana kebijakan-kebijakan saat ini mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dalam perencanaan pembangunan, seperti pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Selain aspek ekonomi, evaluasi dapat mencakup pengukuran dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan-kebijakan pembangunan, dimana sangat

penting dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Menurut Dye (Parsons, 2006, hal. 547) menyatakan: "Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai". Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan perubahan kebijakan yang diperlukan, baik dalam hal perubahan pendekatan atau penyusunan ulang kebijakan itu sendiri. Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan merupakan alat penting dalam siklus perencanaan pembangunan yang membantu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat memberikan hasil yang diharapkan, serta dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kebijakan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan diterapkan, dampaknya, dan perspektif berbagai pemangku kepentingan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi terhadap objek penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan, dan merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah. Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan merupakan proses yang kompleks dan dapat melibatkan banyak elemen dan indikator. Hasil evaluasi harus diambil sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan perencanaan masa depan, dan penting untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif dan transparan untuk mendukung akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan kota. Evaluasi membantu dalam menilai sejauh mana kebijakan perencanaan pembangunan daerah telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yang memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi apakah kebijakan yang ada telah berhasil atau perlu ditingkatkan.

Perencanaan pembangunan daerah sendiri merupakan proses perencanaan strategis dan taktis untuk mengembangkan suatu wilayah geografis atau daerah tertentu. Tujuan utama dari perencanaan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dan dampak yang diharapkan dari

sebuah pembangunan dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk efisiensi pengelolaan pembangunan, distribusi manfaat, dan dampak lingkungan, sehingga penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah dengan cermat agar hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan efektif, sambil meminimalkan dampak negatif, dimana hasil pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-2022 menunjukkan sisi positif dan negatif.

Penting untuk merencanakan dan mengelola pembangunan dengan hati-hati untuk memaksimalkan manfaat positifnya sambil meminimalkan dampak negatifnya, yang memerlukan partisipasi masyarakat, pengawasan terhadap lingkungan, dan kebijakan yang bijaksana. Pelaksanaan RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-2022 telah mendatangkan dan meningkatkan investasi dalam pembangunan daerah, yang dapat mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat Kota Tasikmalaya. Namun demikian dalam pembangunan selanjutnya perlu memperhatikan berbagai aspek lain, karena pembangunan daerah yang tidak terkendali atau berkelanjutan dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem alam, deforestasi, penurunan kualitas air, dan polusi udara. Salah satunya yaitu adanya peningkatan terhadap ketimpangan sosial masyarakat, dimana pembangunan daerah dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang lebih besar jika manfaatnya tidak didistribusikan secara adil di antara masyarakat, yang dapat menciptakan kesenjangan dalam pendapatan, akses terhadap layanan, dan kesempatan ekonomi.

Pembangunan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi di masa depan dan saat ini. Dampaknya dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk jenis pembangunan, pengelolaan sumber daya, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Dampak yang diharapkan dalam suatu pembangunan daerah dapat sangat bervariasi tergantung pada tujuan dan strategi pembangunan yang diimplementasikan. Dalam pelaksanaan RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-2022, telah memiliki dampak positif disamping dampak negatif. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa berbagai pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya telah berjalan dengan baik sehingga memudahkan layanan dan aktivitas masyarakat, namun demikian masih terdapat beberapa program pembangunan yang masih menjadi tugas pelaksanaan RPJMD selanjutnya, terutama berkaitan dengan masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan yang perlu segera diselesaikan, serta masih berlarut-larutnya masalah sampah yang berdampak pada kondisi lingkungan di masa yang akan datang.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya berdasarkan RPJMD 2017-2022 tidak terlepas dari kemampuan keuangan yang dimilikinya, maupun sumber-sumber keuangan lainnya. Ketersediaan anggaran yang dibutuhkan dalam program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-2022 masih kurang sehingga masih terdapat beberapa program pembangunan yang belum selesai, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam RPJMD berikutnya dengan anggaran yang mencukupi sehingga tidak ada lagi program

pembangunan yang tidak selesai yang umumnya dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran.

Istilah *Its indirect cost, including loss of opportunities to do other things*, yang dapat diartikan adanya kerugian tidak langsung termasuk hilangnya peluang untuk melakukan hal lain dalam pelaksanaan RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-2022. Dalam konteks pemerintah, ketika mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya, pembuat kebijakan dan administrator harus mempertimbangkan tidak hanya biaya langsung suatu proyek atau program, namun juga biaya tidak langsung, termasuk potensi hilangnya peluang untuk menginvestasikan sumber daya tersebut di tempat lain. alokasi anggaran untuk pembangunan daerah sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya. Alokasi yang efisien memastikan bahwa sumber daya didistribusikan ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkannya, sehingga mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif, hal tersebut juga berkontribusi terhadap keharmonisan sosial dan stabilitas politik, yang penting bagi kemakmuran dan perdamaian jangka panjang bagi masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Pada dasarnya evaluasi membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari kebijakan perencanaan pembangunan yang ada. Dengan demikian, perbaikan dan perubahan yang diperlukan dapat diidentifikasi dan dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Evaluasi dapat membantu dalam menghindari pemborosan sumber daya yang berharga. Jika suatu kebijakan tidak efektif, evaluasi dapat membantu pemerintah untuk menghentikan atau memodifikasinya. Evaluasi juga membantu dalam menciptakan akuntabilitas di antara para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil dalam perencanaan pembangunan. Melalui adanya evaluasi dapat membuka kesempatan kepada masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ketika masyarakat memiliki akses kepada hasil evaluasi, mereka dapat berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih informasi. Keputusan yang didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh melalui evaluasi lebih mungkin untuk berhasil. Evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu memantau kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Ini memungkinkan perubahan kebijakan dan tindakan korektif yang diperlukan seiring waktu. Evaluasi juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan perencanaan pembangunan. Hal ini dapat termasuk dampak lingkungan, sosial, atau ekonomi yang tidak diinginkan. Melalui adanya evaluasi memungkinkan organisasi dan lembaga terkait untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Hal ini dapat membantu meningkatkan kapasitasnya dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan di masa depan. Dengan melakukan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara teratur, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat

meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan dampak positif dari upaya pembangunan daerah

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022 dapat di evaluasi melalui *the impact on the target situations or group*, yaitu dampak terhadap situasi atau kelompok sasaran mengacu pada dampak atau konsekuensi tindakan, intervensi, maupun dalam bentuk kebijakan, dimana melalui pelaksanaan RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-2022 memiliki dampak positif bagi pembangunan di Kota Tasikmalaya, meskipun masih terdapat beberapa aspek negatif yang perlu ditangani yang merupakan dampak dari adanya pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, I. (2004). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Sinar Grafika.
- Joko, W. (2001). Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia.
- Linayati, dkk. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Trias Politika, Vol 2. No.2 : 203 – 215.
- Parsons, W. (2006). Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Kencana Prenada media Group.
- Wahab, A. S. (2008). Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara.